

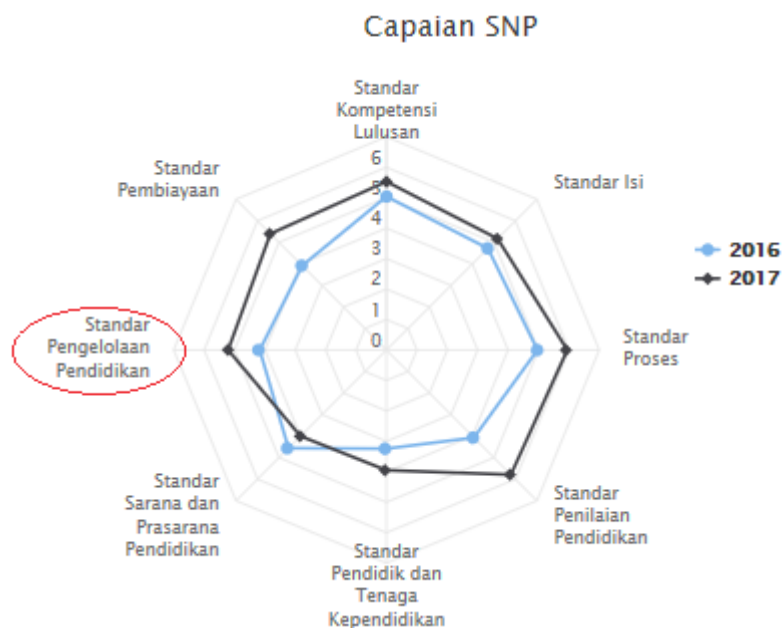
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manajemen pendidikan suatu hal yang berkaitan dengan pengelolaan proses dalam bidang pendidikan untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Ruang lingkup dan bidang kajian manajemen sekolah merupakan ruang lingkup dan bidang kajian manajemen pendidikan. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/ madrasah. Menurut Sudjana (2000, hlm. 77) (dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2015, hlm. 87) mengemukakan bahwa “manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma – norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya memiliki hubungan dan saling keterkaitan dengan lainnya.” Hal tersebut dilaksanakan oleh orang atau beberapa orang yang ada dalam organisasi dan diberi tugas untuk melaksanakan tugas tersebut. Menurut Triatna (2015, hlm. 27) “sekolah merupakan pendidikan dalam bentuk lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tahapan dan perkembangannya”.

Manajemen sekolah merupakan faktor yang paling penting dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Permasalahan yang dihadapi dalam mengelola sekolah seringkali menjadikan pihak sekolah belum mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu, khususnya bagi peserta didik itu sendiri, sehingga muncul berbagai keluhan dari peserta didik, guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat umum, bahwa pendidikan yang dilaksanakan di sekolah itu belum memenuhi standar mutu. Kondisi ini bukanlah suatu asumsi, tetapi sebuah kenyataan yang dapat dilihat pada data capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) berikut ini.



Gambar 1. 1 Capaian 8 SNP pada tingkat nasional tahun 2016 – 2017

Sumber: Diolah dari data mutu pada website

<http://pmp.dikdasmn.kemdikbud.go.id/rapornng>

Apabila kita melihat berdasarkan data - data dan kondisi nyata yang ada di lapangan yaitu pada Capaian Standar Pengelolaan secara nasional pada tahun 2016 dan 2017 di atas menunjukkan kondisi pencapaian mutu pendidikan secara nasional masih belum memenuhi standar yang ditetapkan. Sekolah - sekolah yang memenuhi standar ditandai dengan skor 7. Adapun pencapaian “Standar Pengelolaan” secara nasional baru mencapai 4,17 (2016) dan 5,21 (2017).

Dalam Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 mencatat persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM realisasinya **belum** mencapai target yang ditetapkan. SMP/SMPLB yang memenuhi SPM ditargetkan sebesar 75,13% di tahun 2017. Dari target tersebut berhasil terealisasi sebesar 63,80%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, capaian tahun 2017 mengalami koreksi sebesar -7,1%. Tercatat pada tahun 2016 SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebesar 70,9%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2019 yaitu 75,37% maka capaian tahun 2017 tersebut masih memiliki selisih cukup besar yaitu 11,57%. SPM SMP meliputi pemenuhan terhadap 4 (empat)

standar pendidikan yaitu ketenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan pengelolaan.

Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam manajemen sekolah yang memerlukan pemecahan secara sistematis, mengingat pemenuhan 8 SNP sudah dilakukan sejak tahun 2006 sampai 2017 atau kurang lebih selama 11 tahun, sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada level satuan pendidikan (sekolah), pemenuhan standar pengelolaan ini masih menjadi kebingungan bagi banyak kepala sekolah dikarenakan mereka belum memahami bagaimana seharusnya melakukan proses manajemen sekolah. Banyak kepala sekolah tidak memahami bagaimana caranya mengetahui bahwa manajemen sekolah yang dikelolanya ada dalam kondisi sehat atau sebaliknya.

Oleh sebab itu, perlu adanya suatu alat/instrument terstandar yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur tingkat kesehatan (penyakit) manajemen sekolah. Pada tahun 2018, pengkajian mengenai bagaimana kesehatan manajemen sekolah telah dilaksanakan dan telah menghasilkan pengetahuan baru mengenai “Patologi Manajemen Sekolah”. Hasil penelitian tersebut membutuhkan tindaklanjut untuk membuat alat/instrumen untuk mengetahui perkembangan kesehatan manajemen sekolah yang dirinci menjadi 7 bidang, yaitu (1) kesehatan perencanaan sekolah, (2) perencanaan penganggaran sekolah, (3) kesehatan pengorganisasian sumber daya sekolah, (4) kesehatan implementasi program sekolah, (5) kesehatan kepemimpinan sekolah, (6) kesehatan supervisi sekolah, dan (7) kesehatan evaluasi program sekolah.

Pentingnya realisasi penelitian ini akan dapat diketahui apabila dihubungkan dengan sasaran strategis Universitas Pendidikan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Renstra UPI 2016-2020, khususnya pada halaman 72 dan 73, yaitu: Terselenggaranya riset yang berorientasi pada produk unggulan dalam berbagai bidang ilmu, produk kebijakan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pendidikan, serta penyelesaian isu-isu nasional dan internasional. Selain itu, ke depan, semua lulusan Departemen Administrasi Pendidikan FIP UPI, menguasai bagaimana memahami kesehatan manajemen satuan pendidikan, bagaimana mendeteksinya,

dan bagaimana melakukan rekomendasi serta melaksanakan penyehatan satuan pendidikan. Oleh karena itu Laboratorium Administrasi Pendidikan perlu memiliki instrumen diagnosis kesehatan (penyakit) manajemen sekolah terstandar sebagai *knowledge capital* UPI yang akan menjadi *income generating* secara kelembagaan; dan Pengelola dan penyelenggara sekolah sangat memerlukan instrumen terstandar dalam mendiagnosis penyakit manajemen sekolah dan melakukan pemecahan masalah secara terstandar.

Menurut Hendrayat Soetopo (2006, hlm. 96) dalam Ali Imron (2013, hlm. 165) salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah adalah faktor manajemen sekolah. Dalam Triatna, Hartini & Rosalin (2019, hlm. 105) menegaskan bahwa proses umum manajemen sekolah dimulai dari perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, kepemimpinan, dan evaluasi. Penelitian ini merupakan penelitian pada bidang kesehatan penganggaran sekolah. Fattah (2009, hlm. 47) mengemukakan bahwa penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budget*). *Budget* merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Onismura (2011, hlm. 64-65) fungsi penganggaran dalam manajemen sekolah memegang peranan yang sangat penting. Karena sekalipun konseptual perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian sudah disusun tetapi jika tidak ditunjang dengan penganggaran yang jelas maka akan menghambat seluruh proses pengelolaan pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah menjelaskan Kompetensi Kepala Sekolah. Kompetensi Kepala Sekolah terdiri dari 5 (lima) yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Dalam Kompetensi Manajerial, Kepala Sekolah diharuskan mengelola keuangan sekolah/ madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.

Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah saat ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan diselenggarakan secara otonom pada tingkat kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan tingkat provinsi untuk pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Otonomi penyelenggaraan pendidikan ini menyebabkan pengelolaan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota, termasuk memastikan sekolah memiliki dana operasional sekolah sesuai standar pembiayaan pendidikan. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) yaitu “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendidikan pada Informasi APBN 2019 yaitu 492,5 triliun Rupiah dengan pertumbuhan 13,2 %. Anggaran pendidikan yang didistribusikan melalui transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 308,4 triliun Rupiah.

Urusan pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kota Bandung, Tahun 2014-2018, hlm. 177) di antaranya belum optimalnya tata kelola sekolah menyangkut alokasi DAK untuk ruang kelas baru, dana BOS, DSP/SSP; transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran lembaga pendidikan masih rendah; biaya pendidikan sekolah menengah masih membebani orang tua peserta didik

Dalam jurnal Erdiana Silele, Harijanto Sabijono & Rudi J. Pusung (2017) dengan judul Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) studi kasus pada SD Inpres 4, Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat memberikan hasil penelitian sebagai berikut

- (1) Perencanaan dana BOS pada SD Inpres 4 Halmahera Barat **tidak sesuai** dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015 khususnya dalam penyusunan RKAS yang seharusnya disahkan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Dalam pelaksanaan dana BOS yang difokuskan pada pengalokasian dana BOS pada SD Inpres 4 Halmahera Barat sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015; penyaluran dana BOS pada SD Inpres 4 Halmahera Barat sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS

nomor 80 tahun 2015. (3) Penggunaan dana BOS pada SD Inpres 4 Halmahera Barat **tidak sesuai** dengan petunjuk teknis dana BOS karena hanya memenuhi 11 komponen saja. (4) Untuk pelaporan pertanggungjawaban dana BOS **tidak sesuai** dengan petunjuk teknis karena (a) laporan intern khususnya dalam transparansi penggunaan dana BOS pada peneliti menemukan bahwa sekolah ini **tidak menyediakan** papan informasi atas penggunaan dana BOS dan (b) laporan ekstern **tidak sesuai** khususnya dalam pembukuan dana BOS peneliti menemukan bahwa tidak ada pembukuan yang lengkap juga *opname* kas dan berita acara pemeriksaan kas juga **tidak ada**. (hlm. 1626-1635)

Permasalahan manajemen sekolah saat ini dilihat dari penganggaran pendidikan adalah sekolah tidak memahami bagaimana kondisi kesehatan penganggaran, bagaimana melakukan penyehatan penganggaran sekolah.

Menurut Triatna (2018, hlm. 36) kategori bentuk penyakit dalam organisasi pendidikan, yaitu (1) ketidaksesuaian, (2) ketidakberfungsian, dan (3) kekurangan. Pencapaian tujuan sekolah banyak terhambat oleh ketidakadaan alat untuk mengetahui masalah – masalah nyata yang dihadapi manajemen sekolah. Untuk memecahkan masalah ini, perlu dibuat instrumen untuk mendeteksi kesehatan (penyakit) manajemen sekolah. Hasil penelitian tahun ke-1 telah menghasilkan pengetahuan mengenai “Struktur Pengetahuan Patologi Manajemen Sekolah” sebagai bagian dari Patologi Organisasi Pendidikan.

Latar belakang masalah di atas menunjukkan perlunya dibuat dan dikembangkan instrumen diagnosis kesehatan penganggaran sekolah. Keluaran penelitian ini adalah dihasilkannya instrumen untuk mendiagnosis penyakit penganggaran sekolah. Sementara dampak jangka panjangnya untuk merencanakan peningkatan mutu oleh Kepala Sekolah untuk keberlangsungan sekolahnya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul “Diagnosis Kesehatan Penganggaran Sekolah di Sekolah Laboratorium Percontohan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah “mendiagnosis kesehatan penganggaran sekolah di Sekolah Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia” dengan rumusan masalah sebagai berikut

Wiwit Setiawati, 2019

DIAGNOSIS KESEHATAN PENGANGGARAN SEKOLAH DI SEKOLAH LABORATORIUM PERCONTOHAN KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan@upi.edu

1. Apa saja dimensi dan indikator kesehatan penganggaran sekolah?
2. Instrumen seperti apakah yang digunakan untuk mendiagnosis kesehatan penganggaran sekolah?
3. Bagaimana penggunaan instrumen diagnosis kesehatan penganggaran sekolah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendiagnosis kesehatan penganggaran sekolah di Sekolah Laboratorium Percontohan Kampus UPI. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini, meliputi

1. Untuk menganalisis dimensi dan indikator kesehatan penganggaran sekolah.
2. Untuk menghasilkan instrumen yang digunakan untuk mendiagnosis kesehatan penganggaran sekolah.
3. Untuk menguji penggunaan instrumen diagnosis kesehatan penganggaran sekolah.

1.4 Manfaat/ Signifikansi Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain

1. Manfaat dari segi teori
Secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat dan diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam mengembangkan ilmu Patologi Organisasi Pendidikan, khususnya dalam menyediakan instrumen diagnosis kesehatan penganggaran sekolah.
2. Manfaat dari segi praktik
Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat bagi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penyelenggara sekolah Laboratorium percontohan UPI untuk menjadi alat dan bahan dalam mendiagnosis kesehatan penganggaran sekolah.

1.5 Sktuktur Organisasi Skripsi

Untuk mempermudah pembaca melihat dan memahami isi dari penelitian ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut

- BAB I : Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi skripsi.
- BAB II : Kajian Pustaka, berisi konsep-konsep dan teori-teori yang melandasi penelitian, diperoleh dari buku dan sumber-sumber lain yang mendukung. konsep-konsep dan teori-teori dalam penelitian ini yaitu mengenai kesehatan penganggaran sekolah.
- BAB III : Metode Penelitian, berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian serta komponen-komponen penelitiannya. dalam hal ini, peneliti menggunakan metode *Research and Development* (R&D).
- BAB IV : Temuan dan Pembahasan, memuat pengolahan atau analisis data beserta pembahasan atau analisis hasil temuan di lapangan dengan pemaparan dan pembahasan data yang disajikan.
- BAB V : Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.